

## ELASTISITAS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Kiagus Zainal Arifin**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
zainalarifin0413@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar elastisitas belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Selatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)nya. Dalam menganalisis permasalahan adalah dengan diskripsi dan dengan statical analysis. Data diperoleh dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Badan Pusat Stisitk propinsi Sumatera Selatan, berupa data *time series* dan data *cross section*. Untuk mendapatkan angka elastisitas dari ke dua indikator ekonomi daerah di atas, data dimasukkan ke dalam suatu model regresi linier dalam bentuk logaritma. Model regresi logaritma linier ini dikenal dengan *constant elasticity*. Landasan teorinya adalah teori elastisitas konstan dan teori pengeluaran pemerintah (government expenditure). Hasil penelitian mendapatkan bahwa ada hubungan positif yang sangat erat antara variabel pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota dengan PDRB kabupaten /kotanya. Namun demikian elastisitas hubungan ke duanya tidak elastis (inelastis). Ini berarti walaupun pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komponen pertumbuhan ekonomi daerah, namun penambahan jumlah belanja pemerintah daerah tidak terlalu direspon positif oleh PDRB kabupaten/kota.

**Kata kunci:** belanja daerah, produk domestik regional bruto

### Abstract

*This study aims to determine how large the expenditure elasticity of the district/city in South Sumatra province to the Gross Regional Domestic Product (GDP) of her. In analyzing the problem is with the description and the statical analysis. Data obtained from the Provincial Government and the Central Bureau Stisitk South Sumatra, in the form of time series data and cross section data. To get the elasticity number of economic indicators to the two areas above, the data entered into a linear regression model in the form of logarithms. Logarithmic linear regression model is known as Constant Elasticity. Theoretical basis is a constant elasticity theory and the theory of government spending (government expenditure). The results of the study found that there is a positive relationship between the variables are very closely by local government districts/ cities with GDP district /city. However, the elasticity relationship to them is not elastic (inelastic). This means that although government spending district/city become an inseparable part of the component of regional economic growth, but increase the number of local government spending is not too responded positively by GDP district/city.*

**Keyword:** *spending of local governments, regional gross domestic product*

### 1. Pendahuluan

Propinsi Sumatera Selatan merupakan propinsi yang potensial dapat memakmurkan rakyatnya, ini dapat dilihat dari nilai PDRB propinsi yang menduduki peringkat lima besar nasional (BPS

Sumsel: 2011). PDRB yang besar tersebut dikontribusikan oleh PDRB 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari komposisi PDRB Sumatera Selatan, ada 3 daerah yang persentase kontribusi PDRBnya

paling tinggi, yaitu Kota Palembang 32,5% atau setara dengan 58,6 trilyun rupiah, Kabupaten Musi Banyuasin 17,1 persen atau setara 30,8 trilyun rupiah, Kabupaten Muaraenim sebesar 12,94% atau 23,3 trilyun rupiah. Sedangkan yang paling kecil atau rentah Kota Pagaralam yang hanya 0,80 persen atau 1,4 trilyun rupiah.

Jika PDRB dijadikan indikator kemakmuran masyarakat, maka APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan indikator kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi daerahnya. Data APBD Kabupaten kota tahun 2011 menunjukkan ada 3 daerah yang APBDnya tinggi, yaitu Kabupaten Muba (1,9 trilyun rupiah), Kota Palembang (1,7 trilyun rupiah), dan Kabupaten Muaraenim (1,2 trilyun rupiah). Sedangkan Kota Pagaralam hanya 488 milyar rupiah.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah ke dua indikator ekonomi PDRB dan APBD mempunyai pengaruh satu sama lain, selanjutnya seberapa besar angka elastisitas hubungan ke dua variabel ekonomi daerah ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa erat hubungan kedua variabel PDRB dan APBD dan seberapa besar respon atau sensitifitas PDRB apabila terjadi tambahan belanja pemerintah daerah. Sedangkan manfaatnya dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Analisis elastisitas atau analisis sensitifitas digunakan untuk mengukur berapa persen satu variabel akan berubah, bila satu variabel lain berubah sebesar satu persen. Angka elastisitas (koefisien elastisitas) adalah bilangan yang menunjukkan berapa

persen satu variabel tak bebas akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel lain yaitu variabel bebas, berubah satu persen (Rahardja: 2004). Sedangkan *Teori elastisitas konstan* oleh Gujarati cocok digunakan dalam permodelan dengan data penelitian ini yang berbentuk data panel (pooled data). Teori elastisitas konstan merupakan teori yang model regresi liniernya berbentuk *log-linier*.

Model *log-linier* mempermudah menentukan besaran elastisitas, karena koefisien variabel bebas dalam model log-linier adalah merupakan angka elastisitas, hal ini berbeda dengan bentuk regresi linier lainnya, yang koefisien variabel bebas dalam model bukan merupakan angka elastisitas (Gujarati: 2007). Secara umum bentuk formulasi untuk mencari elastisitas, adalah:

$$\begin{aligned} \text{Elastistas (E)} &= \frac{\% \text{ perubahan Y}}{\text{perubahan X}} \\ &= \frac{\frac{\Delta Y}{Y} \cdot 100}{\frac{\Delta X}{X} \cdot 100} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} \cdot \frac{X}{Y} \\ &= \text{kemiringan (X/Y)}. \end{aligned}$$

Zimroben (2010) menemukan bahwa realisasi PAD, realisasi Pendapatan Transfer, realisasi Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Yuliarmi (2008) mendapatkan bahwa Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali, sedangkan Investasi dan Pengeluaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali. **Devarajan** (1996), penelitiannya di 43 negara berkembang (dimuat di *Journal of Monetary Economic*), menyimpulkan bahwa secara statistik *Current Expenditure* mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain disimpulkan bahwa kesalahan pada negara-

negara berkembang adalah sering terjadi misalokasi public expenditure dalam capital expenditure (belanja modal) nya.

## 2. Metoda Penelitian

Ruang lingkup penulisan hanya pada data sekunder Belanja Daerah pada APBD kabupaten/kota dan Produk Domestik Regional (PDRB) kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data diambil selama 5 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Untuk melihat hubungan ke dua indikator di atas, dicari dari koefisien elastisitas Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap PDRB kabupaten /kota.

Data berupa data *time-series* dan data *cross-section*, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Propinsi Sumatera Selatan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Propinsi Sumatera Selatan.

## Definisi Operasional

*Belanja Daerah* (Permendagri No. 13 tahun 2006) terdiri atas 2 pos belanja, yaitu: *Pos Belanja Tidak Langsung* disingkat BTL, yang terdiri atas: Belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, dan Belanja tak terduga dan *Pos Belanja Langsung* disingkat BL, yang terdiri atas: Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja modal. Belanja Daerah (BD) merupakan penjumlahan dari *Belanja Tak Langsung* (BTL) dan *Belanja Langsung* (BL) pemerintah daerah kabupaten /kota selama satu periode anggaran atau selama satu tahun.

*Produk Domestik Regional Bruto* disingkat PDRB, adalah total produksi barang dan

jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian daerah dalam periode satu tahun, biasanya dihitung dengan nilai uang. PDRB dapat berupa PDRB harga berlaku dan PDRB index harga atau PDRB angka konstan. Nilai variabel PDRB diambil dari angka PDRB kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan per tahun selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

## Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan data panel (*pooled data*) yang dimasukkan ke dalam model regresi (berganda) dengan menggunakan program *Eviews*. Untuk menghindari masalah multi kolinieritas antara dua variabel yang yang diuji, maka data dibuat menjadi format data panel (*pooled data*). Menurut Ghazali (2009) data panel (*pooled data*) menjadi jalan keluar untuk mengobati masalah multi kolinieritas. Selain itu, keuntungan menggunakan data panel adalah tidak perlu lagi dilakukan uji asumsi klasik sebagaimana biasa pada model regresi yang menggunakan data *time-series* (Gujarati: 2007)

Model log-linier untuk mencari angka elastisitas hubungan Belanja Daerah dengan PDRB kabupaten/kota, sebagai berikut

$$\text{Log PDRB} = \beta_1 + \beta_2 \text{Log Belanja Daerah} + \epsilon$$
dipakai untuk uji regresi satu variabel bebas Belanja Daerah, dan:

$$\text{Log PDRB} = \beta_1 + \beta_2 \text{Log BTL} + \beta_3 \text{Log BL} + \epsilon$$
dipakai untuk uji regresi dua variabel bebas Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Kondisi Umum Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan berdiri sejak 12 september 1950 dengan ibukota

Palembang. Luas daratan provinsi Sumatera Selatan ini mencapai 8,7 juta hektar terhampar di 15 kabupaten /kota. Sekitar 64 persen wilayah propinsi Sumatera Selatan ini ada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Oki), dan Kabupaten Musi Rawas (Mura). Sedangkan wilayah yang paling luas adalah Kabupaten Oki sekitar 1,7 juta hektar dan wilayah paling kecil adalah Kota Palembang, hanya seluas 37,4 ribu hektar. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan ini sekitar 7,41 juta jiwa (BPS).

Provinsi Sumatera Selatan sekarang terdiri atas 17 kabupaten/kota hasil pemekaran dari beberapa kabupaten yang ada sebelumnya. Kabupaten yang dimekarkan adalah kabupaten Empat Lawang dari induknya kabupaten Lahat dan yang terakhir adalah kabupaten PALI, dari induknya kabupaten Muaraenim.

### **Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.**

Dari Data BPS Sumsel, kota Palembang sebagai ibukota propinsi Sumatera Selatan, menyumbang hampir 29 persen atau sekitar 19,8 trilyun rupiah nilai PDRB propinsi Sumatera Selatan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7.37 persen. Untuk tingkat kabupaten, kabupaten Musi Banyuasin dan Muaraenim adalah kabupaten yang paling besar kontribusi ke PDRB propinsi, yaitu lebih dari 30 persen, atau sekitar 20,8 trilyun rupiah. Jadi apabila ke tiga daerah yaitu Palembang, Muaraenim dan Musi Banyuasin digabungkan, maka hampir 60 persen kekayaan Sumatera Selatan berada pada ke 3 daerah ini, yaitu 49,7 trilyun rupiah (dari 69 trilyun rupiah PDRB provinsi Sumatera Selatan). Dilihat dari topografi daerah,

struktur ekonomi kabupaten /kota bertumpu pada 3 sektor produksi utama, yaitu sektor primer, sekunder dan tertier. Pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/kota hanya bergeser pada ke tiga sektor tersebut.

Kota Palembang, hampir seluruh nilai rupiah PDRBnya disumbangkan oleh sektor sekunder dan tertier, sektor primer hampir tidak berkontribusi secara signifikan. Sedangkan *sektor primer* yang mencakup kegiatan *pertanian, pertambangan, dan penggalian* relatif tidak dimiliki oleh kota ini. Seperti kebanyakan ibukota propinsi atau ibukota kabupaten, sektor primer memerlukan luas lahan yang besar, sementara lahan-lahan bagi kota lebih diperuntukan bagi pemukiman dan bangunan lainnya. Palembang lebih mengandalkan *sektor sekunder* yang mencakup kegiatan *industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih* serta *bangunan* dan *sektor tertier* yang meliputi kegiatan *perdagangan, hotel dan restoran, kegiatan angkutan dan komunikasi, kegiatan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan* serta *jasa-jasa lain*.

Dibandingkan dengan kabupaten Musi Banyuasin dan Muaraenim, hampir 75 persen nilai rupiah PDRBnya dari sektor primer, karena ke dua kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang potensial (minyak bumi dan batubara). Kondisi ini hampir sama dengan kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Selatan masih mengandalkan sektor primer untuk menopang pertumbuhannya, walau ada pergeseran kontribusi sektor pada tahun-tahun terakhir.

Dilihat dari perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang sektor primer tidak dapat diandalkan terus menerus

karena sifat sektor ini yang cepat habis dan tidak dapat diperbahurui, sedangkan dampak ekologinya merusak lingkungan. Adalah lebih baik bila pemerintah daerah kabupaten /kota memikirkan untuk meletakkan landasan yang kuat pada sektor sekunder atau tertier sesuai dengan sifat dan potensi daerah agar pada suatu saat nanti bila terjadi pergeseran atau transformasi dari sektor primer ke sektor-sektor sekunder atau tertier, landasan berupa infra struktur untuk peralihan sudah siap.

### **Struktur/Komposisi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan**

Peran pemerintah daerah terhadap ekonomi daerahnya dapat dilihat dari komposisi atau struktur belanja daerah di dalam APBD dan belanja yang dikeluarkan dari tahun ke tahun. Sebagaimana diketahui belanja daerah ditujukan untuk menciptakan infra struktur perekonomian daerah agar menjadi daya tarik sektor swasta berinvestasi ke daerah.

Pengeluaran pemerintah untuk *Belanja Daerah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terbagi atas dua pos pengeluaran, yaitu *Belanja Tak Langsung* dan *Belanja Langsung*. Dari kedua belanja ini, Belanja Langsung mempunyai dampak langsung ke perekonomian daerah, karena berisi program-program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas-dinas yang ada di daerah, seperti *belanja barang dan jasa, dan belanja modal*. Kabupaten Musi Banyuasin paling tinggi pos belanja langsungnya di tahun 2011. Sedangkan pos belanja lainnya adalah Belanja Tidak Langsung terdiri dari *belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan daerah*.

Dari tabel komposisi belanja daerah kabupaten/kota (*Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sumsel*), menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja di Kabupaten Musi Banyuasin sejak dari tahun 2007, menduduki peringkat pertama dari 15 kabupaten /kota di Sumatera Selatan yakni sebesar 1,9 trilyun rupiah, jumlah ini bahkan lebih tinggi dari belanja daerah Kota Palembang yang hanya 1,6 trilyun rupiah.

Namun komposisi belanja tersebut berbeda untuk ke dua kabupaten dan kota ini, Kota Palembang porsi Belanja Langsungnya lebih kecil dari porsi Belanja Tak Langsungnya, yaitu 43% Belanja Langsung dan 57% Belanja Tak Langsung. Sedangkan kabupaten Musi Banyuasin porsi Belanja Langsungnya lebih besar yaitu 66% dibandingkan Belanja Tak Langsungnya, yaitu 34%. Diantara ke 15 kabupaten/kota, ada beberapa kabupaten/kota yang menganggar-kan porsi Belanja Langsungnya lebih besar dari Belanja Tak Langsungnya di atas 60%, seperti kabupaten Musi Banyuasin, Musirawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang, dan Pagar Alam, ada yang sebaliknya atau bahkan ada yang menganggarkan sama antara belanja tak langsung dengan belanja langsung. Namun secara umum, hampir semua kabupaten/kota merubah komposisi Belanja Tak Langsungnya menjadi lebih besar dari Belanja Langsung.

### **Elastisitas Belanja Daerah Atas PDRB Kabupaten/Kota.**

Setelah melihat uraian di atas, maka pada bagian ini dicoba untuk melihat bagaimana sifat hubungan tersebut bila dibuat dalam model persamaan regresi. Oleh karena penelitian ingin mengetahui seberapa besar

respon PDRB kabupaten/kota bila terjadi perubahan belanja daerah, maka uji model diharapkan akan memperoleh angka elastisitas dari hubungan keduanya.

Untuk mengetahui seberapa besar respon tersebut, maka hasil uji model log-linier didapat sebagai berikut:

$$\text{LogPDRB}^* = 1,6746^* + 0,2034\text{LogTOBEL}^*$$

Std. Error (0,049)

(0,026)

t-stat (33,812) (7,700)

R<sup>2</sup> (0,995)

Hasil regresi *log-linier* di atas dapat dibaca:

1. Nilai t-statistic model = 7,700 > dari nilai t-tabel = 3,00 dan berada pada daerah terima H1, berarti cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1 yang berarti *variabel bebas Tobel (Belanja Daerah) dapat menerangkan variabel terikat PDRB*.
2. Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) = 0,9953, artinya variasi Tobel (Belanja Daerah) mampu menjelaskan variasi PDRB sebesar 99%, sisanya 1 persen dijelaskan faktor lain di luar model.
3. Nilai koefisien korelasi positif 0,997 menunjukkan hubungan searah yang kuat antara Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota dengan PDRB kabupaten/kota.
4. Elastisitas Tobel (yang konstan) adalah 0,2034, yang menunjukkan bahwa *apabila Tobel (Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota) naik sebesar 1 persen, PDRB kabupaten/kota rata-rata akan naik 0,2034%*. Oleh karena elastisitasnya lebih kecil dari 1 berdasarkan nilai absolutnya dikatakan memiliki PDRB yang *inelastis*.

Bentuk model *log linier* ini menunjukkan bahwa koefisien ( $\beta$ ) variabel bebas adalah sebagai elastisitas variabel bebas terhadap variabel tak bebas (Gujarati, 2007). Jadi

dari model log-linier di atas, angka 0,2034 menunjukkan besar elastisitas Tobel atau Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota atas PDRB kabupaten/kota lebih kecil dari satu, atau Inelastis. Angka ini menunjukkan bahwa PDRB kabupaten/kota tidak terlalu responsif terhadap perubahan Belanja Daerah kabupaten/kota, misalnya *pemerintah daerah kabupaten/kota menaikkan Belanja Daerahnya sebesar 100%, maka hanya akan menaikkan PDRB sebesar 20,34% saja*.

### Elastisitas Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung atas PDRB Kabupaten/Kota.

Untuk mencari koefisien elastisitas dua variabel bebas Belanja Tak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) dari persamaan model log-linier (2), diperoleh hasil:

$$\text{Log (PDRB)} = 0,1419 + 0,6055^*\text{log (BTL)}$$

+

$$0,4877^*\text{log (BL)}$$

Std. Error (0,176) (0,095) (0,144)

t-stat (0,802) (6,327) (3,383)

F-stat (89,112)

R<sup>2</sup> (0,712)

Model *log-linier* di atas ini dapat dibaca, sebagai berikut:

1. Pada Uji Simultan, nilai *F-statistic* pada model pilihan fixed lebih baik dari nilai t-statistic dan F-statistic pada model pilihan none dan random. Nilai *F-statistic* model = 89,112 > dari nilai F-tabel = 3,00 dan berada pada daerah terima H1, berarti cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1 yang *berarti variabel bebas BTL dan BL secara bersama-sama dapat menerangkan variabel terikat PDRB*.
2. Pada Uji Parsial, nilai t-statistic BTL = 6,327 dan nilai t-statistic BL = 3,383 > dari nilai t-tabel antara -1,960 dan

+1,960, yang berarti cukup kuat alasan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ , yang berarti variabel bebas BTL dan BL secara individual dapat menjelaskan variabel terikat PDRB.

3. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0,7122, artinya variasi Belanja Tak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) pemerintah kabupaten/kota mampu menjelaskan variasi PDRB kabupaten/kota sebesar 71 persen, sisanya 19% dijelaskan faktor lain di luar model.
4. Nilai koefisien korelasi positif 0,997 menunjukkan hubungan searah yang kuat antara Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung pemerintah kabupaten/kota dengan PDRB kabupaten/kota.
5. Elastisitas Belanja Tak Langsung (BTL) adalah 0,6055, yang menunjukkan bahwa apabila Belanja Tak Langsung pemerintah kabupaten/kota naik sebesar 100%, PDRB kabupaten/kota rata-rata akan naik sebesar 60,044%. Elastisitas Belanja Langsung (BL) adalah 0,4877, yang menunjukkan bahwa apabila Belanja Langsung pemerintah kabupaten/kota naik sebesar 100%, PDRB kabupaten/kota rata-rata akan naik sebesar 48,77 persen. Oleh karena elastisitasnya kedua variabel bebas BTL dan BL lebih kecil dari 1 berdasarkan nilai absolutnya, PDRB kabupaten/kota dikatakan Inelastis.

Sebagaimana pada persamaan log-linier satu variabel, nilai koefisien ( $\beta_2$ ) variabel bebas BTL sebesar 0,6055 dan nilai koefisien ( $\beta_3$ ) variabel bebas BL sebesar 0,4877 lebih kecil dari 1, maka elastisitas Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung atas PDRB kabupaten/kota adalah Inelastis, artinya PDRB kabupaten/kota juga tidak respon terhadap perubahan

tambahan Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

### **Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian Daerah**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS dapat dipakai sebagai bahan evaluasi pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun swasta selama periode tertentu. Selanjutnya, gambaran yang diperoleh dengan menggunakan data PDRB ini dapat kita ketahui posisi prestasi setiap kabupaten /kota yang paling tidak dapat dilihat dari dua aspek yaitu peringkat kabupaten/kota berdasarkan kontribusi PDRBnya dalam perekonomian dan struktur ekonomi disetiap kabupaten /kota dan adanya pergeseran struktur ekonomi tersebut.

Sebagaimana pernyataan di atas, paling tidak ada dua pelaku ekonomi yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah, pemerintah daerah kabupaten kota dan sektor swasta. Apabila PDRB dapat dijadikan ukuran kinerja perekonomian daerah, maka APBD dengan Belanja Daerah dapat dijadikan ukuran kinerja pemerintah daerah

Dari hasil uji statistik terhadap model persamaan regresi (1) di atas menunjukkan ada pengaruh kuat searah pemerintah daerah kabupaten/kota (Belanja Daerah) dalam peranannya terhadap kemajuan perekonomian daerahnya (PDRB), akan tetapi pengaruh kuat tersebut tidak diikuti dengan respon yang tinggi PDRB kabupaten/kota terhadap bila terjadi perubahan Belanja Daerah., dimana tambahan 100% Belanja Daerah hanya direspon 20% saja oleh PDRB kabupaten/kota.

Hasil ini menunjukkan rata-rata kinerja pemerintah daerah di 15 kabupaten/kota belum maksimal mengelola perekonomian daerahnya lewat instrumen Belanja Daerah membangun infra struktur ekonomi daerah yang memicu atau merangsang mitra kerjanya yaitu pihak swasta untuk memanfaatkan infra struktur tersebut dalam memajukan perekonomian daerah. Ketidak maksimalan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola potensi ekonomi daerahnya adalah karena masih mengandalkan sektor primer (kecuali kota Palembang) sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan ekonomi daerah. Padahal pertumbuhan sektor ini selama 5 tahun terakhir cenderung turun (BPS Sumsel).

Kontribusi sektor primer terhadap PDRB masing-masing kabupaten/kota, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi (kecuali kota Palembang dan Lubuk Linggau). Namun 5 tahun kemudian di tahun 2011, kontribusi sektor ini berkurang di seluruhnya kabupaten/kota, yang terendah kota Pagar Alam turun 8%, dari 34% di tahun 2007 menjadi 26,2%.

Kabupaten Musi Banyuasin yang paling tinggi kontribusi sektor primer diantara kabupaten/kota lainnya, turun sebesar 7%, yaitu dari 81,51% di tahun 2015 menjadi 74,68 di tahun 2019. Kabupaten ini harus mewaspadaai perekonomiannya bila hanya mengandalkan sektor primer. Walaupun kontribusi PDRB kabupaten ini paling menonjol dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, namun ironisnya pertumbuhan PDRB pertahun di tahun 2011 ini justru paling kecil diantara pertumbuhan PDRB kabupaten/kota lain, yakni hanya 3,42%.

Data juga mengindikasikan rata-rata penurunan peran sektor primer sebesar 4,12% selama 5 tahun terakhir di hampir 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan ini.

Bila angka penurunan 4,12% ini diasumsikan tetap selama 5 tahun ke depan, maka dapat diperkirakan akan ada beberapa kabupaten/kota yang akan mengalami kesulitan ekonomi akibat berkurangnya kontribusi sektor primer ini. Apalagi bilaantisipasi untuk mencari dan menyiapkan sumber lain yaitu dari sektor sekunder dan tertier tidak dilakukan sejak dari sekarang, karena pembiayaan APBD kabupaten /kota untuk pembangunan daerah berasal dari sektor ini.

Data menunjukkan paling tidak ada 6 kabupaten/kota yang harus berhati-hati dalam mengelola sektor primernya terutama di sektor pertambangan dan penggalian yang seperti telah dibicarakan di atas ada kemungkinan potensi kerugian di sektor ini. Kabupaten Musi Banyuasin, kabupaten Muaraenim dan Musirawas akan merugi sebesar 830 milyar, 626 milyar, dan 270 milyar rupiah di tahun 2016, apalagi kalau kita lihat struktur perekonomian, dua kabupaten yakni Kabupaten Musi Banyuasin (13,31% pertanian, 44,54% pertambangan) dan Kabupaten Muaraenim (13,49% pertanian, 29,25% pertambangan) Sektor primernya masih didominasi oleh Sektor pertambangan dan Sektor pengangkutan dan komunikasi 14,11% tahun 2011 dibanding 11,30% tahun 2007. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 12,51 tahun 2011 dan hanya 7,40 tahun 2007 (BPS Prov. Sumsel: 2019). Dengan membangun dan menyediakan infra struktur ekonomi daerah seperti jalan, jembatan, pelabuhan, terminal, penyediaan air bersih, listrik, sarana transportasi, sarana perbankan, menjadi insentif pelaku ekonomi masuk ke sektor ini.

Kota Palembang mungkin dapat dijadikan sebagai rujukan bagaiman kota yang tidak memiliki sektor primer ini dapat tumbuh



bahkan lebih tinggi dari kabupaten /kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan ini, hanya dengan mengandalkan sektor primer dan sekunder, sehingga kota lambat laun dapat menciptakan karakter kota sebagai ciri tersendiri. Dapat saja pergeseran peran dilakukan pada sektor primer itu sendiri, yaitu dengan memberikan peran sektor pertanian dan perkebunan lebih besar dari sektor pertambangan dan penggalian. Sebagaimana data statistik menunjukkan sektor pertanian rata-rata kabupaten/kota berkurang kontribusinya di tahun 2019 sebesar 5,42%, padahal tahun 2015 sebesar 6,76%. Bila tidak dilakukan pembenahan di sektor pertanian ini, ada kemungkinan dalam jangka panjang provinsi Sumatera Selatan kesulitan memenuhi kebutuhan diri sendiri akan hasil pertanian.

Struktur Belanja Daerah kabupaten/ kota yang terbagi atas Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tak Langsung adalah belanja yang bersifat operasional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas, misal dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, dinas budaya dan pariwisata, dinas-dinas lainnya yang ada di kabupaten /kota, belanja atau pengeluaran seperti gaji PNS atau honorer dan pengeluaran rutinitas operasional SKPD tersebut, pengeluaran ini tidak terkait langsung dengan pembangunan ekonomi daerah.

Sedangkan pengeluaran untuk Belanja Langsung sangat berhubungan langsung dengan perekonomian daerah, seperti pengeluaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Ke tiga jenis belanja ini biasanya berisi program-program pembangunan ekonomi daerah yang telah direncanakan oleh SKPD atau Dinas-dinas yang ada di kabupaten/kota, seperti misalnya di Dinas

Pertanian ada program penyuluhan pertanian, program peningkatan keahlian, ada program pembelian traktor dan alat pertanian, serta program pembukaan lahan sawah baru misalnya. Dengan demikian, sebenarnya kalau pemerintah kabupaten/kota mau memainkan perannya dalam perekonomian daerah lewat instrumen Belanja Daerah ini, adalah dengan merubah saja komposisi atau porsi Belanja Langsunnya (terutama pos Belanja Modal) lebih besar dari porsi Belanja Tak Langsung.

Elastisitas PDRB terhadap Belanja Daerah rata-rata kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan menunjukkan angka elastisitas di bawah satu atau inelastis, mengindikasikan ada permasalahan yang serius di rata-rata kabupaten/kota. Mengapa respon PDRB sebagai representasi perekonomian daerah begitu rendah terhadap jika terjadi tambahan perubahan Belanja Daerah pada APBD kabupaten/kota, padahal secara statistik hubungan keduanya sangat erat.

Sebagaimana disebutkan di atas, Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota dapat menjadi instrumen pokok pengendalian perekonomian daerah dalam bidang moneter, bahkan Keynes mengatakan bahwa *government expenditure* ini adalah salah satu instrumen moneter pemerintah dalam ikut campur tangan di dalam perekonomian disamping instrumen fiskal. Dengan demikian, pada kasus di atas ini perlu dicari mengapa instrumen Belanja Daerah ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, mungkin ada faktor-faktor penyebabnya. Ada beberapa indikasi yang dapat dilihat, misalnya kabupaten /kota di Sumatera Selatan yang rata-rata mengandalkan pembangunan ekonominya melalui sektor primer, padahal hanya sektor tambang dan penggalian saja yang

tumbuh selama tahun 2007 sampai 2011 ini, sedangkan sektor pertanian cenderung turun pertumbuhannya.

Di sisi lain, pengeluaran untuk Belanja Tak Langsung bertambah sebesar 97 persen dan Belanja Langsung bertambah hanya 19 persen, padahal diketahui pengeluaran untuk Belanja Langsung berisi program-program pembangunan ekonomi daerah lewat pos belanja modal dan pos belanja barang dan jasa, sementara ditempat lain, rasio Belanja Daerah cenderung naik terhadap PDRB kabupaten/kota. Fenomena ini memunculkan pertanyaan apakah pengeluaran Belanja Daerah kabupaten/kota sudah tepat sasaran atau misalokasi, sebagaimana hasil penelitian Devarajan (1996) di negara-negara berkembang yang mengindikasikan adanya misalokasi *public expenditure* dalam *capital expenditure*.

#### 4. Kesimpulan

Ada hubungan yang erat dan searah antara Belanja Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota, baik secara partial maupun secara simultan. Ini menunjukkan bahwa belanja daerah merupakan bagian penting dan menentukan bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Hubungan yang erat di atas, tidak diikuti dengan elastisitas yang tinggi. Elastisitas belanja daerah terhadap PDRB kabupaten/kota tidak elastis (inelastis). Ini berarti jika ada tambahan pengeluaran untuk belanja daerah, maka perubahan tambahan tersebut tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap tambahan kenaikan PDRB. Pengeluaran untuk Belanja Tak Langsung cenderung mengalami peningkatan dengan porsi sangat besar dibandingkan peningkatan Belanja Langsung, dan secara rasio Belanja Daerah naik persentasenya terhadap PDRB kabupa-ten/kota

1. Hampir seluruh kabupaten /kota yang ada di Sumatera Selatan lebih mengandalkan sektor primer sebagai leading sektor pembangunan daerah dibandingkan sektor sekunder dan tertier. Padahal di dalam sektor primer hanya sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sedangkan sektor pertaniannya cenderung turun.

Pemerintah daerah harus fokus mengurus pos Belanja Daerah dalam APBDnya, karena pos ini sangat signifikan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Membuat kebijakan atau program SKPD yang *bottom up* melalui pos Belanja dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap implementasi program tersebut. Dengan demikian program dapat dirasakan manfaatnya bagi pelaku ekonomi daerah pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dibuat berdasarkan kebutuhan atau sebagai insentif pembangunan ekonomi daerah bukan berdasarkan keinginan. Merubah struktur ekonomi daerah dengan yang tidak lagi mengandalkan sektor primer sebagai *leading* sektor pem-bangunan daerah mengingat sifat sektor ini yang tidak mudah diperbaharui bila sudah rusak (*unrenewable resources*). Dengan kata lain, perlu difikirkan pengembangan sektor sekunder atau sektor tersier, sebagai potensi daerah yang baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Branson H, William. 1989. *Macroeconomic Theory and Policy*. Third Edition, Harper & Row Publisher, New York.
- Devarajan, Shantayanan. 1996. *The Composition of Public Expenditure*

- and Economic Growth. Journal of Monetary Economic. Volume 2, November 1996.*
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar Dasar Ekonometrika*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Rahardja, Pratama, Mandala Manurung. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Setiawan, Dwi Endah Kusri. 2010. *Ekonometrika*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Shochrul R, Dyah W. Sari. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suharyadi, Purwanto. 2009. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Yuliarmi, Ni Nyoman. 2008. *Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali*. Buletin Studi Ekonomi, Volume 13 Nomor 2, Tahun 2008. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Zimroben Ompusunggu. 2010. *Analisis Pengaruh Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada 8 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara)*. Tesis Program Studi Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.